

Ekspansi Fast Fashion melalui Jaringan Produksi Global terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat

Yusuf Fadillah Tirta Kusumah¹, Arfin Sudirman², Deasy Silyya Sari³
Universitas Padjajaran, Indonesia ^{1,2,3}

ABSTRACT

This study will discuss the capital expansion that moves through the Global Production Network which is suspected by the Fast Fashion cultural movement on the absorption of labor in West Java. This study uses the concept of Capital Expansion by using the basic logic of Capitalism. This paper is to the economic impact of the fast fashion production network on labor absorption in West Java so each region, both city and district, has economic productivity and is able to help Indonesia increase foreign investment, compete with developing countries and have the largest labor-intensive industrial exports in regional and global. This paper uses descriptive qualitative research methods with primary and secondary research sources derived from observations to government institutions, internet based research, and literature studies. This study explains and believes that the existence of a global production network in the fast fashion sector can reduce unemployment and increase economic productivity in West Java and increase the value of Indonesian textile exports.

Keywords: *Capital Expansion, Fast Fashion, Global Production Network, Labor, West Java.*

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai ekspansi kapital yang bergerak lewat Jaringan Produksi Global yang ditengarai oleh pergerakan budaya Fast Fashion terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan konsep Ekspansi Kapital dengan menggunakan logika dasar Kapitalisme serta konsep Jaringan Produksi Global. Tulisan ini terbatas pada dampak ekonomi dari jaringan produksi global tekstil dan fast fashion terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat sehingga masing masing daerah baik kota maupun kabupaten memiliki produktivitas ekonomi serta mampu membantu Indonesia dalam meningkatkan investasi luar negeri, berkompetisi dengan negara berkembang dan memiliki ekspor industri padat karya terbesar di kawasan maupun global. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber penelitian primer maupun sekunder yang berasal dari hasil observasi ke institusi pemerintah, *internet based research*, serta studi kepustakaan. Penelitian ini menjelaskan dan percaya bahwa dengan adanya jaringan produksi global di sektor fast fashion mampu menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas ekonomi di Jawa Barat serta meningkatkan nilai ekspor tekstil Indonesia.

Kata Kunci: *Ekspansi Kapital, Fast Fashion, Jaringan Produksi Global, Tenaga Kerja, Jawa Barat*

A. PENDAHULUAN

Bergulirnya arus modal, inovasi serta percepatan globalisasi menimbulkan implikasi berupa terbukanya pasar, akses terhadap pasar serta hasrat konsumerisme yang tinggi terhadap pakaian sehingga kreasi akan membentuk, bukan dibentuk oleh aturan yang dikenal sebagai kebutuhan primer. Pakaian dikenal sebagai bentuk ekspresi, identitas yang melekat pada tubuhnya dalam mempertahankan eksistensial di lingkungan sosial. Kemunculan hasrat

konsumerisme salah satunya dari industri pakaian yang dikenal masyarakat yakni *Fast Fashion*. Merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh *House of Commons Environmental Audit Committee* yang berjudul "*Fixing Fashion : Clothing Consumption and Sustainability*, fast fashion merupakan tindakan akselerasi oleh perusahaan industri dalam mempertahankan bahkan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap pakaian dengan cara memunculkan design dalam rentan waktu yang singkat, sehingga dibutuhkan faktor produksi sangat rendah (Environmental Audit Committee 2019).

Fast fashion muncul pada tahun 1980an didahului oleh perusahaan induk tekstil Inditex yang membuat dan mendistribusikan merk pakaian ke Eropa dan Amerika Serikat. Konsep pakaian yang pada awalnya digunakan untuk menjawab berbagai musim di eropa bertransisi menjadi produk tepat waktu. Dibentuknya *Multi Fibre Arrangement* (MFA) dan berubah menjadi *Agreement on Textiles and Clothing* (ATC) berfungsi sebagai aktor yang mengatur perdagangan tekstil dan pakaian dunia dengan memberlakukan prinsip pasar bebas terhadap ekspor tekstil dan pakaian dari negara berkembang ke negara maju (Heerden et al., 2003). Fenomena ini terjadi karena banyaknya perusahaan tekstil yang berpusat di eropa tidak cukup menampung permintaan terhadap konsumen yang pada akhirnya perusahaan tersebut mengekspansi daerah lain yakni negara berkembang agar mengurangi biaya produksi namun target produksi tepat waktu tetap berjalan (Annie Radner Linden, 2016). Hal ini menimbulkan persaingan untuk menumbuhkan keunggulan komparatif bagi negara berkembang untuk bisa meningkatkan nilai ekspor serta bisa menyerap lapangan kerja bagi masyarakat.

Indonesia sebagai entitas di kawasan Asia Tenggara juga sebagai penyuplai bahan mentah atau setengah jadi di sektor tekstil ke negara maju. Salah satunya dengan terus mendatangkan investasi di sektor padat karya dengan menggenjot produk yang bisa di ekspor ke luar Asia Tenggara. Menurut data yang dikeluarkan oleh Lokadata, realisasi investasi Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017 mencapai 2.712,7 Triliun rupiah dengan lonjakan paling tinggi di tahun 2017 sebanyak 692,9 Triliun Rupiah. Khusus industri alas kaki dan TPT investasi masing-masing Rp 2,8 Triliun tahun 2013 menjadi Rp 14 Triliun, melonjak hampir tujuh kali lipat dari tahun 2017 (Lokadata 2021).

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia mempunyai wilayah yang luas, padat penduduk serta mempunyai sarana dan prasarana terhadap jalur distribusi barang dan jasa. Keunggulan ini bisa dimanfaatkan dengan mendatangkan investasi luar negeri untuk bisa menanamkan modal serta menyerap lapangan kerja yang signifikan. Industri tekstil yang memproduksi fast fashion menjadi salah satu alternatif dalam menggerakkan produktivitas dan roda perekonomian di tingkat kota/kabupaten karena tingginya permintaan di dalam maupun di luar negeri. Guna memanfaatkan keunggulan ini, maka pemerintah daerah bersama *stakeholder* perlu bersinergi untuk menciptakan iklim yang sehat guna menciptakan lapangan kerja dari ekspansi kapital fast fashion di Jawa Barat.

B. KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan menggunakan kerangka konsep mengenai ekspansi berupa masuknya kapital atau modal yang dimiliki kapitalis untuk memperbesar keuntungan baik itu efisiensi maupun mempengaruhi pasar skala tertentu. Secara historis karakter ini muncul ketika muncul prinsip keterbukaan pasar yang disebabkan oleh perkembangan pemikiran liberalisme yang percaya bahwa ekonomi adalah faktor determinan dalam mengatur masyarakat berdasarkan asas kebebasan dan kompetisi melalui pasar terbuka. Robert Gilpin mendefinisikan pasar terbuka sebagai sesuatu di mana barang dan jasa dipertukarkan atas

dasar harga relatif (Gilpin 1987). Pasar terbuka didasari pada sistem kapitalisme atau kepemilikan modal kelas borjuasi untuk berkompetisi dengan kelas borjuasi lainnya atas dasar kepentingan mencari keuntungan dan memupuk modal (Gilpin 2001). Dengan demikian meskipun secara konsep sedikit berbeda namun jika mengacu pada dialektika yang terjadi maka jelas bahwa ada hubungan yang tak terpisahkan karena kapitalisme hanya bisa bergerak lewat ekonomi pasar yang kompetitif dan terbuka.

Sebuah karakter pokok dari ekonomi terbuka adalah ketegantungan dan intentitas kompetisi di antara para penjual dan pembeli. Prinsip keterbukaan dan kompetisi itu sendiri yang menuntut adanya suatu mekanisme proses produksi, distribusi dan penetapan harga tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun (*the law of demand*). Saat permintaan terhadap barang atau jasa tertentu tinggi, para produsen akan terangsang untuk ekspansif meningkatkan pasokan sehingga potensi kenaikan harga juga meningkat menuju keseimbangan atau *equilibrium* (Mosley 2017). Bertell Ollman mengemukakan bahwa terdapat tujuh karakteristik dari ekonomi terbuka : (1) Uang menjadi faktor penting bagi pasar; (2) tujuan dari semua aktivitas produksi dan investasi adalah memaksimalkan keuntungan; (3) Setiap orang bertanggung jawab atas diri masing masing, hal esensial dari sebuah nilai liberalistic; (4) Orang akan membeli barang dan jasa yang diinginkan, namun hanya jika mereka mampu membayarnya; (5) Orang dipaksa melakukan apa saja dan menjual sesuatu untuk mendapatkan uang; (6) Memaksimalkan keuntungan lebih penting dibandingkan memuaskan kebutuhan sosial (*profite oriented*); (7) Distribusi barang langka (*scarce goods*) terjadi melalui uang, artinya siapa yang mempunyai modal baik berupa kekayaan atau produksi berpeluang memperoleh barang dan keuntungan (Bakry 2019).

Selain karakteristik pokok diatas, ekonomi pasar didasari pada mekanisme kapitalisme memiliki beberapa kecenderungan. Pertama, ekonomi pasar menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam wilayah di mana sistem tersebut berkembang. Pertumbuhan ekonomi dapat tercipta karena mempunyai kekuatan untuk memaksa faktor produksi seperti tanah, buruh, dan modal dalam aktivitas paling produktif. Situasi ini dituntut oleh kompetisi pasar yang membuat produsen ingin mencapai titik tertinggi ekonomi dengan cara inovasi teknologi (Gereffi, 2014). Kedua, ekonomi pasar cenderung berkembang secara geografis melintasi batas batas politik. Kebutuhan akan buruh dan sumber alam murah menjadi logika dominan. Faktor yang mendorong kecenderungan ekspansionis itu menakup skala efisiensi, pertumbuhan dan jalur distribusi. Para aktor ekonomi pasar cenderung mengembangkan aktivitas produksinya di wilayah yang berpotensi menjadi sasaran distribusi atau paling tidak biaya produksi dan distribusi rendah (Gereffi et al., 2005). Ketiga, ekonomi pasar menciptakan redistribusi kekayaan dan aktivitas ekonomi dalam sebuah masyarakat. Meskipun logika pasar semua orang memiliki keuntungan dari partisipasi pasar, dalam praktiknya juga terdapat konsentrasi kekayaan dalam kelompok, kelas, atau wilayah tertentu. Sehingga meskipun agregat berhasil menciptakan pertumbuhan dalam sebuah masyarakat atau negara, terkadang bisa menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan karena mendapatkan keuntungan lebih sedikit (Seabrooke & Wigan 2017). Terakhir, jika memakai level analisis sistemik ekonomi pasar menimbulkan pembagian kerja internasional (*international division of labour*) diantara para produsen. Pembagian kerja tersebut didasarkan atas prinsip spesialisasi atau menurut istilah David Ricardo sebagai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) (Appleby 1978).

Selanjutnya penulis menggunakan konsep jaringan produksi global Peter Dicken. Baginya pembentukan ekonomi yang didasari pada hal geografis ini lah yang memunculkan jaringan kompleks dan membutuhkan penamaan ulang yang lebih signifikan yaitu *Global*

Production Network (GPN) atau Jaringan Produksi Global. Ia berargumen bahwa basis jaringan produksi terintegrasi secara kompleks yang diatur dalam struktur makro sehingga terbentuknya komponen sirkuit jaringan produksi global. Dicken pula menjelaskan juga bahwa rangkaian fungsi, operasi, dan transaksi antara jaringan saling berhubungan dengan komoditas, barang, atau jasa tertentu diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Skema ini melihat bagaimana ekonomi geografi ini dikendalikan dan dikoordinasikan, misalnya seperti Perusahaan Multinasional beroperasi melalui campuran kompleksitas jaringan intra organisasi, antar organisasi, jaringan internal mereka sendiri yang dikendalikan secara terpusat atau bergerak secara relasional melalui aliansi strategis dan hubungan pemasok (Dicken 2011).

Ada enam faktor pendukung yang saling berkesinambungan satu sama lain untuk menjalankan sebuah jaringan produksi yang kompleks tersebut, diantaranya: (1) *inputs to consumptions*, yakni transformasi menuju produk yang didistribusikan dan dikonsumsi namun proses tersebut berjalan secara dua arah antara jalur material produk dan jalur informasi. (2) Penambahan 4 aspek yakni teknologi, energi, servis, dan logistik. Pertama, eskalasi yang membesar dengan masuknya komponen *quality control, research, design* di bagian teknologi. Kedua, pasokan energi seperti minyak, batubara, gas, listrik dan energi terbarukan juga mempunyai faktor penting dalam membangun satu jaringan. Ketiga, layanan dibutuhkan untuk menjalankan roda perusahaan dalam memasarkan, menghitung, jaminan, penjualan dll untuk mempertahankan bahkan meningkatkan konsumen. Keempat, ada logistik yang berfungsi sebagai jalur distribusi baik itu bahan mentah, produk, bahkan untuk melayani konsumen berupa informasi dan akses. (3) Finansial, dari semua proses dagang dan ekonomi kapitalistik modal dan sektor keuangan memerankan peran sentral. Keputusan pemodal memberikan pengaruh yang luar biasa kuat, tidak hanya dalam 'melumasi' sirkuit produksi tetapi juga dalam membentuk mereka melalui keputusan evaluatif mereka tentang apa dan dimana wilayah geografis untuk berinvestasi untuk mendapatkan pengembalian tertinggi atau surplus kapital dan biasanya terintegrasi, terkoordinasi bahkan dikendalikan terutama oleh perusahaan multinasional. (4) Regulasi, jaringan ini tidak berjalan di atas ruang kosong dan hampa. Jaringan produksi ini tetap membutuhkan lahan teritorial sebagai ladang produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal yang paling tepat dalam meletakkan variabel itu ialah negara sebagai aktor teritorial yang mempunyai legitimasi untuk mengatur yang sifatnya memaksa. Semua elemen dalam jaringan produksi global diatur dalam beberapa jenis struktur politik, yang unit dasarnya adalah negara, tetapi juga mencakup lembaga supranasional seperti IMF dan WTO, pengelompokan ekonomi regional seperti UE atau NAFTA, serta skala subnasional (Dicken 2011).

Dua konsep di atas digunakan sebagai alat untuk membantu penulis dalam menjelaskan ekspansi kapital dengan bentuk dan formasi nya baik secara internasional maupun secara sub nasional serta menganalisis peran aktor politik dalam membantu melancarkan bentuk ekspansi tersebut seperti melakukan regulasi dan konsolidasi antar daerah sehingga penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat bisa terpenuhi.

C. METODE PENELITIAN

Dari fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data terlebih dahulu (*data collecting*) kemudian dijelaskan dalam bentuk deskriptif agar penjabaran dan hasil analisis dapat dipahami (Sugiyono 2017). Metode ini pun bertujuan untuk menjelaskan dampak dari ekspansi kapital dari industri yang bergerak di sektor fast fashion dapat membantu meningkatkan

ekonomi baik berupa penyerapan tenaga kerja serta kinerja ekspor Indonesia di sektor tekstil. Metode kualitatif menjadi sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia (subjek penelitian) yang terhunung langsung dengan objek penelitian baik secara bahasanya dan peristilahannya (Lamont 2015). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu primer dengan melakukan wawancara serta mengambil data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sedangkan sekunder penulis mengumpulkan data dari *internet based-research* dan studi kepustakaan seperti jurnal, buku, dan laporan. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk dapat menjawab fenomena dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara *data collecting* dan menggunakan triangulasi data untuk memilah data yang relevan (Pupu 2009).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Multi Fabre Agreement* sebagai Awal Mula Pengaturan Sektor Tekstil Negara Berkembang**

Dengan derasnya proses liberalisasi baik dari sektor air, keuangan sampai dengan perdagangan komoditas sehingga tak luput juga produk primer seperti pakaian dan celana. Dengan dalil untuk tidak membatasi kebebasan masyarakat internasional untuk mendapatkan kases yang mudah kepada barang tersebut. Dari sektor tekstil dan pakaian jadi secara khusus, proses ini tidak lepas dari faktor historis mengapa pakaian hari ini mulai dari perusahaan kelas bawah sampai kelas atas dapat memproduksi pakaian secara massal (Annie Radner Linden 2016). Institusi ini bergerak diluar aturan dari GATT (*General Agreement on Tariffs an Trade*) atau yang sekarang disebut dengan WTO (*World Trade Organization*) yang bergerak di bidang liberalisasi pasar. Berbeda dengan prinsip pasar bebas, aturan yang bergerak di sektor tesktil ini justru bersebrangan dengan ide ini dengan maksud mengatur tentang kuota tekstil dan pakaian secara bilateral dengan maksud untuk tidak mengancurkan produk dalam negeri dan pasokan dalam negeri, yang dikenal dengan *Multi Fabre Agreement* (Heerden et al. 2003)

MFA menghasilkan sejumlah efek anomali dalam produksi dan perdagangan global tekstil dan pakaian. Pertama, penyimpangan dari keunggulan komparatif. Ini memaksa produsen negara berkembang dengan kuota terbatas untuk mengalihkan produksi ke negara-negara yang tidak terlalu dibatasi dan tidak dibatasi dalam hal impor. Hal ini menyebabkan rantai produksi global tidak didasarkan pada keunggulan komparatif serta mekanisme penawaran dan permintaan tetapi pada faktor "politik" dari perdagangan terkelola. Kedua, insentif kontradiktif untuk pola spesialisasi. Karena kuota bersifat kuantitatif, produsen negara berkembang yang tidak dapat meningkatkan jumlah yang mereka hasilkan jelas berusaha meningkatkan nilainya dengan memproduksi barang-barang bernilai tambah lebih tinggi (Ernst et al. 2005).

MFA didirikan sebagai Perjanjian jangka terbatas untuk memungkinkan penyesuaian struktural di negara-negara industri. Pola investasi dan perdagangan di sektor tekstil saat ini sangat ditentukan oleh MFA sehingga menyebabkan peningkatan investasi di negara-negara dengan kuota tinggi seperti Bangladesh, kawasan Karibia, Amerika Tengah, Sri Lanka dan Maladewa, yang memiliki sedikit atau tanpa produksi ekspor tekstil dan pakaian. Investasi itu sering datang dari perusahaan-perusahaan yang melompati kuota dari negara-negara yang sangat kompetitif yang kekurangan kuota. Dalam kasus lain, alokasi kuota yang tinggi dan biaya masuk yang rendah digabungkan untuk menghasilkan generasi baru eksportir garmen. Di Bangladesh, misalnya, industri garmen ekspor tumbuh dari nol pada tahun 1970 menjadi sekitar 3.000 pabrik milik lokal yang mempekerjakan lebih dari 1,5 juta pekerja (terutama

wanita) pada tahun 1999, yang pada gilirannya menyumbang lebih dari 75 persen dari total ekspor negara itu (Heerden et al. 2003). Namun, ada dua faktor penting yang akan mempengaruhi kemampuan eksportir garmen di negara berkembang untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Pertama, sejumlah langkah perdagangan termasuk perjanjian perdagangan regional (*Regional Trade Agreement*), ketentuan perdagangan preferensial bilateral dan hambatan perdagangan nontarif (*Bilateral Preferential Trade Provisions and Nontariff Trade Barriers*) akan terus membatasi pangsa pasar negara berkembang. Kedua, meningkatnya persaingan pasar sektor tekstil dan pakaian global akan memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan posisi eksportir di masa depan dalam rantai produksi komoditas tersebut berupa ekspansi berbentuk modal (Heron 2012).

Jika dilihat secara sekilas distribusi investasi asing langsung (FDI) tampak membingungkan. Kita mengerti bahwa pasar China yang besar dan biaya tenaga kerja yang rendah menarik sebagian besar FDI dan menjadikannya eksportir garmen terbesar di dunia. Namun jika dilihat lebih dalam mereka tidak memiliki biaya tenaga kerja terendah di wilayah tersebut. Survei tahunan biaya tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan konsultan tekstil terkemuka Werner International menemukan bahwa pada tahun 2000 Cina memiliki biaya tenaga kerja per jam sebesar \$0,69 sementara India (\$0,58), Pakistan (\$0,37) dan Indonesia (\$0,32) semuanya menawarkan tarif yang lebih rendah. Mauritius misalnya, memiliki biaya tenaga kerja per jam sebesar \$1,47 dibandingkan dengan Madagaskar sebesar \$0,37. Investor telah mencari platform ekspor yang menawarkan keuntungan terbaik dalam hal perdagangan, baik dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas, hak istimewa perdagangan preferensial lainnya, atau kedekatan geografis dengan pasar utama serta distribusi barang yang lancar. Ketika sejumlah faktor ini digabungkan, mereka secara serentak bahkan sukarela untuk membuat pabrik di negara yang sudah menggabungkan komponen tersebut (Heerden et al. 2003).

Transisi Aturan dari Multi Fabre Agreement ke Agreement Textile and Clothing sampai Pasar Bebas

Tabel 1. Aturan Terkait Kuota dan Pembatasan Impor pada masa ATC

The schedule for freeing textiles and garments products from import quotas (and returning them to GATT rules), and how fast remaining quotas had to be expanded.		
The example is based on the commonly-used 6% annual expansion rate of the old Multifibre Arrangement. In practice, the rates used under the MFA varied from product to product.		
Step	Percentage of products to be brought under GATT (including removal of any quotas)	Percentage of products to be brought under GATT (including removal of any quotas)
1 Jan 1995 (to 31 Dec 1997)	16% (minimum, taking 1990 imports as base)	6.96% per year
Step 2: 1 Jan 1998 (to 31 Dec 2001)	17%	8.7% per year
Step 3: 1 Jan 2002 (to 31 Dec 2004)	18%	11.05% per year

Step 4: 1 Jan 2005 >Full integration into GATT (and final elimination of quotas). >Agreement on Textiles and Clothing terminates.	49% (maximum)	No quotas left
No quotas left The actual formula for import growth under quotas was: by 0.1 x pre-1995 growth rate in the first step; 0.25 x Step 1 growth rate in the second step; and 0.27 x Step 2 growth rate in the third step.		

Sumber : (WTO 2020)

Pada akhir perundingan putaran Uruguay disepakati bahwa negara-negara yang ingin mempertahankan kuota akan berkomitmen untuk menghapusnya secara bertahap selama periode 10 tahun dengan kuota terakhir dicabut pada 1 Januari 2005 sebagaimana dinyatakan dalam *Agreement on Textile and Clothing*. Aturan dan mekanisme yang dilakukan oleh banyak negara di berbagai benua akhirnya berakhir dan digantikan dengan mekanisme baru yang didalamnya terdapat proses liberalisasi yang direkomendasikan oleh *World Trade Organization* sebagai bentuk dan tindakan bahwa aturan MFA ini tidak sesuai pasar bebas meskipun masih ada beberapa kriteria pembatasan seperti yang terlihat di tabel berikut.

Gambar 1. Transisi Ekspor Impor Negara Utama Penghasil Tekstil dan Pakaian

Exports							
Textile		Clothing		Textile		Clothing	
1997	2004	1997	2004	1997	2004	1997	2004
Hong Kong, SAR	10.2	China	14.9	China	20.7	China	26.6
South Korea	9.7	United States	9.3	Hong Kong, SAR	15.7	Hong Kong, SAR	11.4
Taiwan, Prov. China	9.2	Italy	8.5	Italy	10.2	Italy	8.3
Germany	8.9	Hong Kong, SAR	8.0	United States	5.9	Turkey	5.2
Italy	8.8	Germany	7.9	Germany	5.1	Germany	5.2
United States	8.3	Rep. of Korea	6.4	France	3.9	Mexico	3.6
China	8.2	Taiwan, Prov. China	6.1	Mexico	3.7	France	3.6
Japan	5.2	Japan	4.4	United Kingdom	3.4	Bangladesh	2.9
Concentration	68.6	65.4	Concentration	68.4	66.8		
Imports							
Textile		Clothing		Textile		Clothing	
1997	2004	1997	2004	1997	2004	1997	2004
Hong Kong, SAR	13.5	China	15.7	United States	28.6	United States	29.0
China	13.1	Hong Kong, SAR	10.2	Germany	13.5	Germany	9.9
Germany	8.3	United States	8.8	Japan	10.2	Japan	8.9
United States	7.9	Germany	6.9	Hong Kong, SAR	9.0	United Kingdom	7.9
Italy	7.1	Italy	6.7	United Kingdom	6.4	Hong Kong, SAR	6.9
United Kingdom	6.7	United Kingdom	4.7	France	6.4	France	6.9
France	5.6	France	4.6	Netherlands	3.8	Italy	4.6
Japan	4.7	Mexico	4.6	Italy	3.1	Netherlands	3.3
Concentration	66.8	62.3	Concentration	81.1	77.3		

Sumber : (Ernst et al. 2005)

Sejumlah negara berkembang kecil muncul diantara negara pengekspor karena vital bagi pembangunan ekonomi mereka. Jaringan produksi secara alamiah membuat suatu struktur diversifikasi barang dan spesialisasi tempat dimana produksi tersebut dijalankan. Nilai diversifikasi pasar yang tinggi berarti suatu negara mengekspor ke sejumlah besar negara, logika yang sama berlaku untuk diversifikasi produk. Sebuah negara dengan diversifikasi produk yang tinggi akan mengekspor berbagai macam barang tekstil atau pakaian sehingga

berkontribusi pada stabilitas tingkat ekspor. Pelemahan juga bisa terjadi jika diversifikasi di satu negara mengalami penurunan permintaan atau harga satu produk (Magableh 2021).

Negara-negara yang menjadi pengeksportor-pengimpor utama pada tahun 1997 dan 2004 mengalami transisi. Konsentrasi perdagangan di antara delapan negara pengeksportor dan pengimpor utama turun dalam jenjang tersebut. Di antara negara-negara yang tingkat industri rendah, Turki menjadi eksportir baru dalam pakaian sedangkan Meksiko tetap mempertahankan pangsa tinggi dalam ekonomi dunia antara tahun 1997 dan 2004. Eksportir di sektor pakaian justru bermunculan dari negara-negara berkembang seperti Bangladesh (2,9 persen), Indonesia (2,1 persen) dan Rumania (2,0 persen). Turki (2,8 persen) juga merupakan pengeksportor tekstil penting, selain negara-negara Asia seperti Pakistan (1,9 persen), Indonesia (1,8 persen) dan Thailand (1,6 persen) (Ernst et al. 2005).

Namun daya saing industri tekstil dan pakaian di tingkat internasional tergantung pada berbagai faktor lain, tidak terkait langsung dengan perdagangan: (1) Biaya tenaga kerja; (2) Kualitas dan ketersediaan tenaga kerja terampil yang sesuai; (3) Proses produksi; (4) Transportasi (biaya dan waktu pengiriman) dan distribusi; (5) Lingkungan Makroekonomi. Menurut Dicken semua ini harus terpenuhi jika jaringan produksi global berjalan lancar dan tetap berdasarkan nilai yang berlaku baik di pasar maupun secara moral.(Dicken 2011)

Gambar 3. Top 10 Exporters of Textile in 2020

	Value					Share in world exports/imports					Annual percentage change				
	2020	2000	2005	2010	2015	2010-21	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exporters															
China (1)	154	103	202	304	455	7	8	1	2	-	-	-	-	-	-
European Union	94	39.4	325	353	391	0	7	-2	-3	-	-	-	-	-	-
Extra EU Exports	22	115	113	90	61	0	8	-8	-9	-	-	-	-	-	-
India	15	38	41	51	42	2	6	-5	-12	-	-	-	-	-	-
Turkey	12	2.4	35	35	33	3	4	-1	-1	-	-	-	-	-	-
United States of America	11	15	81	48	32	-1	1	-3	-15	-	-	-	-	-	-
Viet Nam (2)	10	0.2	0.4	1.2	2.8	19	14	10	11	-	-	-	-	-	-
Korea, Republic of	8	8.1	5.1	4.3	2.2	-3	0	-7	-15	-	-	-	-	-	-
Pakistan	7	2.9	3.5	3.1	2.0	-1	2	-4	-6	-	-	-	-	-	-
Chinese Taipei	7	7.6	4.8	3.8	2.0	-3	0	-8	-17	-	-	-	-	-	-
Japan	6	45	31	29	16	-2	3	-2	-14	-	-	-	-	-	-
Above 10	204	100	115	145	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importers															
European Union	87	29.7	292	238	243	9	5	-5	-5	-	-	-	-	-	-
Extra EU Imports	60	96	98	96	141	7	7	-4	10	-	-	-	-	-	-
United States of America	45	9.7	105	87	126	7	8	-2	14	-	-	-	-	-	-
Viet Nam (2)	15	0.8	1.5	2.5	4.4	8	14	4	8	-	-	-	-	-	-
China (1)	14	7.8	7.2	8.8	9.9	-2	3	-12	-10	-	-	-	-	-	-
Japan	12	30	27	27	33	5	8	-1	34	-	-	-	-	-	-
United Kingdom	11	4.4	3.5	2.7	3.0	4	2	-3	32	-	-	-	-	-	-
Bangladesh (2)	9	0.8	1.1	1.7	2.5	7	18	-7	-17	-	-	-	-	-	-
Canada	8	2.5	2.0	1.8	1.9	4	2	-3	41	-	-	-	-	-	-
Korea, Republic of	8	2.0	1.8	1.8	1.6	2	8	-6	9	-	-	-	-	-	-
Indonesia	5	0.8	0.4	1.8	1.5	2	10	-2	-21	-	-	-	-	-	-
Above 10	211	81.4	93.8	93.7	98.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : (Lu 2020)

Gambar 2. Top 10 Exporters of Clothing in 2020

	Value					Share in world exports/imports					Annual percentage change				
	2020	2000	2005	2010	2015	2010-21	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exporters															
China (1)	140	92	265	366	316	1	0	-4	-7	-	-	-	-	-	-
European Union	125	28.4	293	289	279	-3	11	1	-8	-	-	-	-	-	-
Extra EU Exports	38	81	86	78	84	4	10	3	-10	-	-	-	-	-	-
Viet Nam (2)	28	0.9	1.7	2.9	6.4	11	15	7	-7	-	-	-	-	-	-
Bangladesh (2)	28	2.6	2.5	4.2	6.3	7	19	0	-15	-	-	-	-	-	-
Turkey	15	3.3	4.2	3.8	3.4	2	4	5	-6	-	-	-	-	-	-
India	13	3.9	3.1	3.2	3.9	1	10	4	-24	-	-	-	-	-	-
Malaysia	10	1.1	0.9	1.1	2.2	10	14	-2	73	-	-	-	-	-	-
United Kingdom	8	2.1	1.8	1.6	1.9	4	6	0	-7	-	-	-	-	-	-
Hong Kong, China	8	-	-	-	-	-10	-4	-11	-30	-	-	-	-	-	-
Domestic exports	0	5.0	2.6	0.1	0.0	-19	-10	-5	340	-	-	-	-	-	-
Re-exports	8	-	-	-	-	-10	-4	-11	-34	-	-	-	-	-	-
Indonesia	6	2.4	1.8	1.9	1.7	1	9	-4	-12	-	-	-	-	-	-
Above 10	378	65.1	74.5	82.1	84.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importers															
European Union	108	32.7	32.4	32.6	34.1	2	5	-1	-7	-	-	-	-	-	-
Extra EU Imports	66	65.4	19.4	21.2	17.6	1	8	-1	-9	-	-	-	-	-	-
United States of America	60	33.1	38.7	32.1	16.8	0	4	0	-14	-	-	-	-	-	-
Japan	28	9.7	8.1	7.2	5.3	0	8	-2	-10	-	-	-	-	-	-
United Kingdom	28	7.5	6.7	7.1	6.3	0	4	-1	-1	-	-	-	-	-	-
Canada (3)	10	1.8	2.1	2.2	2.1	2	5	4	-6	-	-	-	-	-	-
Korea, Republic of	10	0.6	1.0	1.2	2.0	8	16	2	-10	-	-	-	-	-	-
China (1)	9	0.8	0.8	0.7	1.9	14	14	8	-6	-	-	-	-	-	-
Switzerland	8	1.0	1.6	1.4	1.6	4	10	2	-4	-	-	-	-	-	-
Hong Kong, China	8	-	-	-	-	-7	-2	-11	-31	-	-	-	-	-	-
Re-exported imports (2)	1	0.9	-	-	0.2	180	-13	6	-	-	-	-	-	-	-
Domestic Federation (3)	0	2.1	0.3	2.0	1.0	0	7	4	-6	-	-	-	-	-	-
Above 10	348	88.5	88.5	81.6	71.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes significant shipments through processing zones.
(2) Secondary estimates.
(3) Imports are valued f.o.b.

Karena dampak covid-19 negara berkembang yang bergerak di bidang produksi dan ekspor pakaian jadi mendorong permintaan impor bahan baku tekstil seperti benang dan kain sehingga sebagian besar impor tekstil negara berkembang ini turun pada tahun 2020, seiring dengan penurunan ekspor pakaian jadi mereka selama pandemi. Dengan begitu Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang tetap menjadi tiga importir pakaian jadi terbesar di dunia pada tahun 2020 dan masih menyerap 56,2% dari impor pakaian jadi dunia pada tahun 2020 (Lu 2020).

Figure 4 Value Added Manufacturing Tekstil dan Pakaian tahun 2019

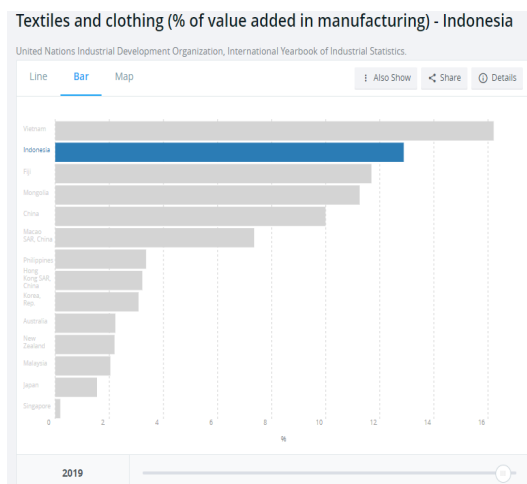
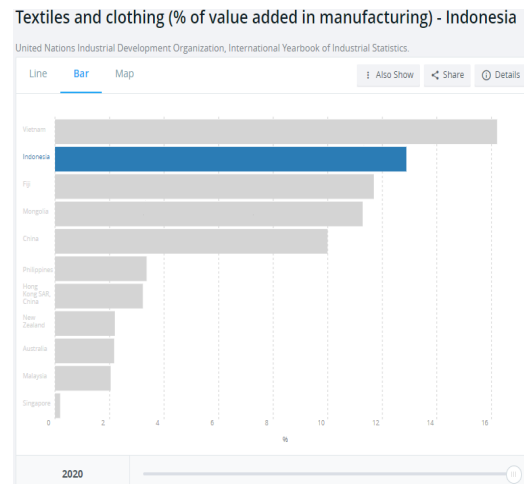


Figure 5 Value Added Manufacturing Tekstil dan Pakaian tahun 2020



Sumber : (World Bank 2020)

Jika kita melihat dari skema yang dijalankan perdagangan industri dan manufaktur sektor tekstil dan pakaian Indonesia berada di tertinggi setelah Vietnam yang notabene negara berkembang dengan regulasi yang fleksibel diikuti Filipina dan Malaysia sebagai kompetitor lain terletak di kawasan Asia Tenggara. Sisanya seperti Fiji, Bangladesh, Hongkong, Australia dsb merupakan negara diluar Asia Tenggara yang mempunyai *Added Value Manufacturing*. Indonesia sendiri di tahun 2019 s/d 2020 mencatatkan *Added Value Manufacturing* sebesar 13 persen meskipun tetap kalah dari Vietnam sebanyak 16 persen. Ini menandakan dengan sudah diakhiri ATC pada 2005 yang dilanjutkan dengan konsep perdagangan bebas ala neoliberal maka jaringan produksi global bisa terlihat dengan indikator geoekonomi dan skala pendapatan negara masing masing.

Pemerintah Jawa Barat dalam memanfaatkan Jaringan Produksi Global Tekstil dan Fast Fashion

Tabel 2. Kontribusi Ekspor TPT Jawa Barat Terhadap Ekspor TPT Nasional Selama 5 Tahun Terakhir

No	Data Ekspor TPT	2017	2018	2019	2020	2021	Januari - Juni		Total 2017 SD Juni 2022
							2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ekspor TPT Nasional	12,53	13,21	12,83	10,55	13,05	5,81	7,34	69,50
2	Ekspor TPT Jabar	6,30	6,49	6,23	5,00	6,19	2,73	3,52	33,72
Share (%)		50,26%	49,13%	48,55%	47,36%	47,46%	46,92%	47,90%	48,52%

Sumber : PDSI Kemendag RI

Dengan diterapkannya sistem pasar bebas di sektor tekstil secara inklusif, pemanfaatan tanah rendah nilai bagi sektor swasta baik itu perusahaan multinasional ataupun aktor non

negara menjadi lahan surplus yang produktif. Salah satu lahan bernilai rendah jikalau melihat dari struktur internasional maka negara berkembang menjadi salah satu entitas yang paling produktif baik dari segi tenaga kerja maupun *state apparatus*. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi wilayah tanah rendah nilai baik dari tenaga kerja maupun sumber daya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat ekspor yang dilakukan provinsi Jawa Barat sektor tekstil hampir mencapai 50% dari total nasional ekspor tekstil ke luar negeri.

No	Deskripsi	2017	2018	2019	2020	2021	Januari-Juni		Total 2017-Juni 2022
							2021	2022	
1	Sutra	63.877	174.502	396.422	190.598	64.778	49.486	34.962	925.160
2	Kapas	1.006.877	653.075	998.883	764.893	732.500	358.687	325.306	4.481.534
3	Serat Tekstil Nabati Lainnya; Benang Kertas Dan Kain Tenunan Dari Benang Kertas	543.845	1.414.141	1.306.121	1.298.192	1.458.758	602.359	540.549	6.561.605
4	Filamen Buatan; Strip Dan Sejenisnya Dari Bahan Tekstil Buatan	716.484.727	653.634.228	601.032.755	372.013.471	450.089.790	217.165.135	261.055.663	3.063.310.635
5	Kain Rajutan Atau Kain Kaitan	71.041.676	75.969.945	79.956.766	79.468.788	74.646.507	40.224.937	32.860.125	413.943.807
6	Pakaian Dan Aksesori Pakaian, Barang Rajutan Atau Kaitan	2.182.021.903	2.326.365.455	2.123.801.975	1.885.933.162	2.403.938.243	997.135.110	1.351.481.058	12.273.541.796
7	Pakaian Dan Aksesori Pakaian, Bukan Rajutan Atau Kaitan	71.790.310	80.060.460	77.312.315	152.717.396	77.928.161	30.891.932	29.946.486	498.755.128
Total		4.849.344.334	5.020.175.311	5.790.896.339	3.823.853.606	4.614.768.335	1.986.435.842	2.658.934.327	25.692.211.486

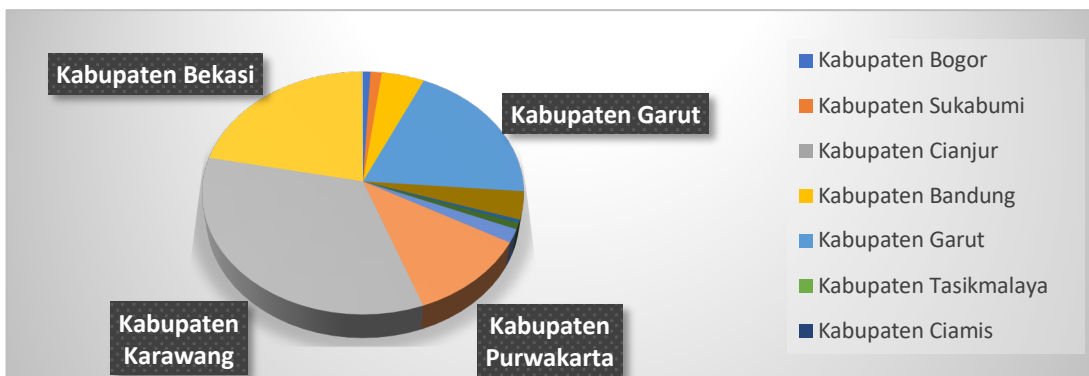
Sumber Diolah dari : PDSI Kemendag RI

Total ekspor yang dilakukan sektor swasta di tingkat nasional maupun sub nasional memang ada beberapa jenis Tekstil dan Produk Tekstil baik dari *raw material* sampai ekspor dalam bentuk produk yang siap pakai. Dari jumlah produk tekstil memang angka yang paling banyak dan signifikan nilai ekspor nya terletak pada sektor Pakaian dan Aksesori Pakaian; Barang Rajutan atau Kaitan; Flamen Buatan; Strip dan Sejenisnya dari Bahan Tekstil Buatan serta Pakaian Dan Aksesori Pakaian; Bukan Rajutan Atau Kaitan. Terlihat dominasi produk jadi tekstil yang menguasai pasar Ekspor di Jawa Barat selaku daerah subnasional juga Indonesia karena dominasi ekspor tekstil berada di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 48,52% dari total ekspor tekstil Indonesia.

Fenomena ini bisa menandakan bahwa proses jaringan produksi global sektor tekstil terkhusus *fast fashion* berjalan di Provinsi Jawa Barat karena dilihat dari struktur kebijakan maupun distribusi barang serta nilai yang dikeluarkan dari total ekspor. Pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jawa Barat secara implisit berkomitmen dalam pengembangan ekspor tekstil ke luar negeri khususnya Eropa dan AS tentu dengan fleksibilitas kebijakan penanaman modal asing (Cakti, 2019). Pemerintah juga mengeluarkan tentang RUU Cipta Kerja di tahun

2020 dan Institusi yang dibentuk yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk memperlancar arus investasi (CNN Indonesia 2020). Ini menandakan bahwa Indonesia dan Jawa Barat merupakan lahan produktif untuk dijadikan lahan untuk ekspansi kapital lewat *state apparatus* untuk menyambung jaringan produksi global.

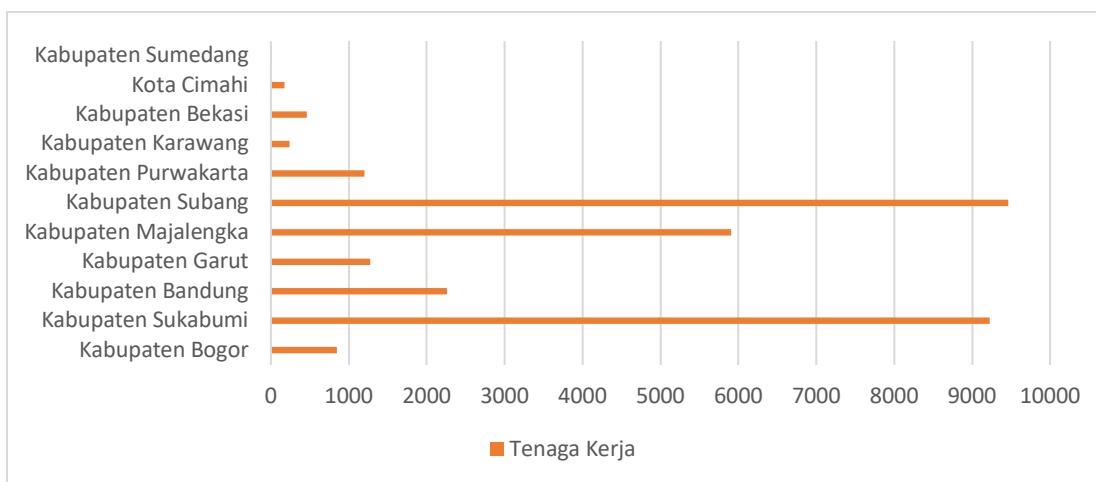
Gambar 6. Investasi Asing Sektor Tekstil 2020



Sumber : Disperindag Jawa Barat

Arus kapital juga bisa terlihat di Provinsi Jawa Barat dibuktikan dengan data jumlah investasi tesktil dan pakaian jadi pada tahun 2020. Terlihat pada gambar diatas bahwa grafik pendapatan dari sektor investasi sektor tekstil di Kota/Kabupaten paling banyak yakni Kabupaten Karawang sejumlah 379 Triliun dilanjutkan oleh Kabupaten Bekasi dengan 243 Triliun dan Kabupaten Garut sebanyak 219 Triliun. Faktor ini tidak terlepas dari biaya tenaga kerja murah dan terampil, transportasi meliputi aksesibilitas dan distribusi. Kabupaten Bandung dan Majalengka juga menempati wilayah yang strategis secara akses dan politik karena berdekatan pusat pemerintahan di Jawa Barat sehingga bisa menarik investor sebesar 52 Triliun dan 41 Triliun.

Gambar 7. Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat Tahun 2020



Sumber : PDSI Kemendag RI

Dampak langsung selain kinerja ekspor yang kalah penting yaitu penyerapan tenaga kerja. Jawa Barat memiliki populasi lebih dari 30 juta jiwa dimana wilayah yang paling mendominasi selain pertanian yaitu industri dan manufaktur. Dengan populasi sangat banyak,

infrastruktur memadai untuk jalur distribusi barang maka ekspansi kapital akan terbentuk dengan syarat fleksibel, murah, efisien dan jangka panjang.

Adanya jumlah investasi yang masuk dari luar negeri ke Jawa Barat tahun 2020 di sektor tekstil jumlah tenaga kerja terserap lebih dari 10 ribu. Berdasarkan grafik yang ada diatas, penyerapan tenaga kerja sektor tekstil paling banyak terjadi di Kabupaten Subang sebanyak 9461 orang lalu Kabupaten Sukabumi sebanyak 9228 orang dan Kabupaten Majalengka dengan 5903 orang. Kota/Kabupaten juga memiliki dampak dari investasi asing sektor tesktil namun penyerapan dibawa angka 2500 orang seperti Kabupaten Bandung 2258 orang, Kabupaten Garut sebanyak 1271 orang, dan Kabupaten Purwakarta 1197 orang.

E. KESIMPULAN

Bergulirnya arus modal di awal 1980an di sektor tidak merata karena danya perjanjian seperti MFA (*Multi Fibre Agreement*) dan ATC (*Agreement on Textile and Clothing*) membuat negara negara berkembang ridak bisa memaksimalkan keunggulan komparatifnya di dunia internasional sehingga perekonomian negara berkembang sulit untuk mengalami kestabian dan kenaikan yang signifikan. Dengan tidak berlakunya aturan MFA dan ATC pasca 2003 membuat negara negara berkembang mengakselerasikan ekonomi di sektor tekstil dan pakaian atau industri padat karya untuk bersaing secara sehat dan kompetitif melalui diversifikasi barang dan aturan yang dibuat negara untuk mempermudah investasi asing masuk dalam wilayahnya. Cara ini efektif untuk memenuhi ekonomi kinerja eskpor negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai penduduk lebih dari 200 juta dan wilayah yang luas untuk dijadikan sebuah lahan ekonomi produktif. Olah karenanya pemerintah Indonesia dan sub nasional perlu membuat suatu regulasi untuk mempermudah investasi luar negeri agar industri khususnya tekstil atau padat karya masuk untuk meningkatkan nilai ekspor dan sektor ekonomi lainnya serta menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya.

Langkah strategis pemerintah Jawa Barat guna meningkatkan ekonomi dan produktivitas terus dilakukan seperti program investasi satu pintu yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Aturan berupa UU Cipta Kerja untuk mendatangkan investasi baik sektor tesktil maupun yang lain. Maka dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah Jawa Barat memanfaatkan momentum ini dengan memaksimalkan kebijakan tersebut sehingga investasi dating di berbagai sektor dan penyerapan tenaga kerja terlaksana guna mengurangi tingkat pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Dengan demikian, pemerintah Jawa Barat berhasil memanfaatkan diversifikasi dan spesialisasi dari jaringan produksi global sektor tesktil sehingga bisa membantu Indonesia dalam orientasi ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Annie Radner Linden. (2016). An Analysis of the Fast Fashion Industry. *Senior Projects Fall*, 1–44.
https://digitalcommons.bard.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=senproj_f2016%0Ahttp://digitalcommons.bard.edu/senproj_f2016/30
- Appleby, J. O. (1978). *Economic Thought and Ideology in Seventeenth Century England* (First Edit). Princeton University Press.
- Bakry, U. S. (2019). *Ekonomi Politik Internasional : Suatu Pengantar* (Second Edi). Pustaka Pelajar.
- Cakti, A. (2019). *Kemendag berkomitmen dukung perlindungan industri tekstil nasional*. Antara.
<https://www.antarane.ws.com/berita/1138967/kemendag-berkomitmen-dukung-perlindungan-industri-tekstil-nasional>

- CNN Indonesia. (2020). *Omnibus Law Diklaim Ciptakan 3 Juta Lapangan Kerja pada 2021*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201023133053-92-561976/omnibus-law-diklaim-ciptakan-3-juta-lapangan-kerja-pada-2021>
- Dicken, P. (2011). *Global Shift : Mapping the Changing Contours of the World Economy* (Six Editio). The Guilford Press.
- Ernst, C., Hernández Ferrer, A., & Zult, D. (2005). The end of the Multi-Fibre Arrangement and its implication for trade and employment. In *Employment Strategy Papers* (Issue 2005/16).
- Gereffi, G. (2014). Global value chains in a post-Washington Consensus world. *Review of International Political Economy*, 21(1), 9–37. <https://doi.org/10.1080/09692290.2012.756414>
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
- Gilpin, R. (1987). The Political Economy of International Relations. In *The Political Economy of International Relations* (First Edit). Princeton University Press.
<https://doi.org/10.4324/9781315254166-8>
- Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy : Understanding The International Economic Order* (First Edit). Princeton University Press.
- Heerden, A. van, Berhouet, M. P., & Caspari, C. (2003). *Rags or Riches ? Phasing-Out the Multi-Fibre Arrangement* (First Edit). International Labour Organization.
- Heron, T. (2012). *The Global Political Economy of Trade Protectionism and Liberalization: Trade reform and economic adjustment in textiles and clothing* (First Edit). Routledge.
- House of Commons. (2019). FIXING FASHION: clothing consumption and sustainability. In *Parliamentary Copyright House of Commons 2019* (Issue February).
<https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmsselect/cmenvaud/1952/1952.pdf>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in Politics and International Relations* (First Edit). SAGE Publications Ltd.
- Lokadata. (2021). *Realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja, 2013-2021*.
<https://lokadata.id/data/realisasi-investasi-dan-penyerapan-tenaga-kerja-2013-2021-1627440834>
- Lu, S. (2020). *WTO Reports World Textiles and Apparel Trade in 2020*. FASH455 Global Apparel & Textile Trade and Sourcing. <https://shenglufashion.com/2021/08/04/wto-reports-world-textiles-and-apparel-trade-in-2020/>
- Magableh, G. M. (2021). Supply Chains and the COVID-19 Pandemic: A Comprehensive Framework. *European Management Review*, 18(3), 363–382. <https://doi.org/10.1111/emre.12449>
- Mosley, L. (2017). Labor and the Global Political Economy. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.189>
- Pupu, S. R. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium* (Vol. 5, pp. 1–8).
- Seabrooke, L., & Wigan, D. (2017). The governance of global wealth chains. *Review of International Political Economy*, 24(1), 1–29. <https://doi.org/10.1080/09692290.2016.1268189>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Nineth Edi). Alfabeta.
- World Bank. (2020). *Textile and Clothing (% of value added manufacturing)- Indonesia*.
https://data.worldbank.org/indicator/NV.MNF.TXTL.ZS.UN?contextual=region&end=2019&locations=ID&most_recent_year_desc=false&start=2019&view=bar
- WTO. (2020). *Textiles: back in the mainstream*.
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm5_e.htm